

KEBIJAKAN KEUANGAN INDONESIA: ALI WARDHANA DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1968-1973

Oleh

Akhmad Fakhurroji dan Zulkarnain, M.Pd

Ozi.ahmad38@yahoo.com, Zulkarnain@uny.ac.id

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Profil Ali Wardhana, (2) Kebijakan Menteri Keuangan Ali Wardhana tahun 1968-1973, dan (3) Dampak Kebijakan keuangan Menteri Ali Wardhana dalam perkembangan perekonomian Indonesia tahun 1968-1973.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah Kuntowijoyo yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah a) pemilihan topik. Tahap kedua adalah b) pengumpulan sumber, baik primer maupun sekunder. Tahap ketiga adalah c) verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat adalah d) interpretasi untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Dan tahap kelima adalah e) historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil penelitian ini adalah (1) Ali Wardhana adalah lulusan sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan mendapatkan gelar Ph.D di *University of California at Berkeley*, Amerika Serikat tahun 1962. Ali Wardhana dijuluki sebagai *the longest finance minister* karena menjabat sebagai menteri keuangan terlama selama tiga periode (1968-1983) dan menjadi menko ekuin pada tahun 1983-1988. Ali Wardhana juga merupakan salah satu dari *Berkeley Mafia*; (2) Kebijakan Menteri Keuangan Ali Wardhana selama menjabat menteri keuangan tahun 1968-1973 adalah mengeluarkan kebijakan anggaran berimbang pada APBN (*Balanced Budget*), menyempurnakan tarif perpajakan dan bea cukai berdasarkan sistem MPS (*Self Assesment System*) dan MPO (*With Holding System*), menyempurnakan atau mereformasi birokrasi di lingkungan kementerian keuangan, dan memberlakukan mata uang Rupiah (Rp) dan menghentikan mata uang Irian Barat Rupiah (IBRp) yang beredar di wilayah Irian Jaya; (3) Pada akhir kabinet pembangunan I tahun 1973, perekonomian di Indonesia tumbuh rata-rata diatas 6% berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto (GDP). Hal tersebut tidak lepas dari dampak tiga kebijakan besar yang dikeluarkan oleh menteri keuangan Ali Wardhana. Kebijakan keseimbangan anggaran dalam APBN dapat meningkatkan tabungan pemerintah (surplus) dan inflasi dapat dikendalikan, bahkan hanya mencapai 0.9% pada tahun 1971. Penyempurnaan peraturan perpajakan yang baru dapat meningkatkan pendapatan negara dari tahun ke tahun. Dan kebijakan reformasi birokrasi berpengaruh pada tata kelola dan kinerja yang teratur di setiap direktorat jenderal dalam lingkungan departemen keuangan.

Kata kunci: *Ali Wardhana, Kebijakan Keuangan, APBN*

INDONESIAN FINANCE POLICY: ALI WARDHANA AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDONESIA IN 1968-1973

By

*Akhmad Fakhurroji and Zulkarnain
History Education Major, Yogyakarta State University*

ABSTRACT

This research aimed to identify, (1) the profile of Ali Wardhana, (2) The policy of Ali Wardhana as the Minister of Finance in 1968-1973, and (3) the impact of economic policy of Ali Wardhana in the Indonesian economic development in 1968-1973.

This research applied the historical research method by Kuntowijoyo consisting of some stages: 1) topic selection; 2) sources collection, primary and secondary ones; 3) verification or source criticizing; 4) interpretation of the facts of history found; and 5) historiography of history writing.

The result of the study is that 1) Ali Wardhanawas a graduate of Economic Faculty at Indonesia University (FEUI) and got his Ph.D. title in University of California at Barkeley, United State of America in 1962. Ali Wardhana was known as the longest finance minister because he served as Minister of Finance for three periods (1968-1983) and became the Coordinating Minister of Economy, Finance, and Industry in 1983-1988. Ali Wardhana was one of Barkeley Mafia; 2) the policy from the Finance Minister Ali Wardhana during 1968-1973 was issuing his policy on balanced budget in APBN, improving the tax and customs tariff based on the MPS (Self-Assessment System) and MPO (With Holding System), refining or reforming the bureaucracy in the finance ministry, and enacting the Indonesian Rupiah (IDR) and stop the currency of West Irian Rupiah (IBRp) circulating in the region of Irian Jaya; 3) At the end of the cabinet of Development I in 1973, the economy of Indonesia grew on average by more than 6%, based on the value of Gross Domestic Product (GDP). It was closely related to the impact of three major policy issued by the finance minister Ali Wardhana. The policy on balanced budget in APBN could increase government savings (surplus) and inflation could be controlled, even it reached only 0.9% in 1971. The completion of the new tax laws might increase state revenues from year to year. The policies of bureaucratic reformation affected the governance and regular performance in each directorate-general within the finance department.

Keywords: Ali Wardhana, Finance Policy, APBN

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia hingga tahun 1965 mengalami berbagai macam persoalan dalam mencari landasan perekonomian yang tepat. Landasan perekonomian Indonesia pada era Soekarno, Orde Lama (*Old Order*), lebih

dikenal dengan sebutan “Ekonomi Terpimpin”. Manifesto politik Soekarno tentang perekonomian nasional, pidato pada tanggal 17 Agustus 1959, lantang diucapkan dengan kalimat “*tidak ada manusia yang dihisap oleh manusia lain*”.¹ Artinya adalah landasan perekonomian Indonesia ke depan mengarah pada pembentukan masyarakat Indonesia yang sosialis. Rencana tersebut untuk melawan tumbuhnya masyarakat kapitalis, yang dicap sebagai *manusia penghisap orang lain*.

Menasionalisasikan bisnis-bisnis asing, reformasi tanah, partisipasi buruh dalam manajemen perusahaan, dan bekerjasama dengan negara-negara sosialis serta negara non-blok merupakan perbincangan yang serius dalam mencari landasan ekonomi yang mengarah pada ekonomi sosialis.² Ekonomi Terpimpin yang dicetuskan oleh Soekarno, tidak pernah berhasil dan tidak pernah dibuktikan selama Orde Lama berlangsung. Keadaan ekonomi Indonesia malah semakin memburuk dari waktu ke waktu.

Realitas ekonomi menjadi tidak menentu karena akibat dari realitas politik Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1962, penolakan paket bantuan dari Bank Dunia 1962, semboyan anti asing “*Go to Hell with Your Aid!*”, dan juga situasi politik dalam negeri yang semakin tegang antar golongan.³ Akibatnya, ekonomi Indonesia menjadi sukar dan kemudian pada tahun 1963 dikeluarkan peraturan tentang DEKON (Deklarasi Ekonomi).⁴ DEKON menjadi penting

¹ Semaun, *Tenaga Manusia Postulat Teori Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta: Penertiban Universitas, 1961), hlm. 87.

² Sosialisme di Indonesia berbeda dengan makna sosialisme yang sesungguhnya. Sosialisme Indonesia tidak memeluk faham Pertentangan Kelas, Revolusi dari kaum buruh, Diktatur Protelariat, dan bagian dari Kominform. Hal serupa juga bisa dilihat dari konsep komunis RRC dan Uni Soviet. Lihat Moh. Sadli, *Bunga Rampai Ekonomi: Readings in Economics, Bab 7 Tata Susunan Industri dalam Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: Bappit Pusat Permata, 1960), hlm. 88.

³ Terutama dalam kubu sayap-kiri, yang terorganisasi oleh PKI, dan sayap-kiri PNI, dan sayap-kanan yang terdiri dari tentara, sayap-kanan PNI, dan partai-partai Islam. Walaupun Soekarno mengemukakan gagasan Nasakom (Nasional Agama Komunis), tetapi pertentangan antar aliran tersebut masih terjadi. Max lane, *Unfinished Nation*, (Yogyakarta: Djaman Doeloe: 2014)., hlm. 62-68.

⁴ Deklarasi Ekonomi berisi tentang reorientasi perekonomian Indonesia ke depan,

dilakukan, mengingat kenaikan harga selama kurung waktu 1961-1962, sebesar 400%.⁵

Kebijakan pemerintah tentang DEKON tidak selaras dengan realitas ekonomi yang ada di masyarakat, serta menyimpang dari prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi mengenal adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, antara ekspor dan impor, antara arus barang dan arus jasa. Sebagai contoh, pengeluaran negara berkali-kali melebihi dari batas penerimaan negara. Kekurangan tersebut kemudian ditutup dengan mencetak uang yang baru.⁶ Secara logis kebijakan pemerintah tersebut telah keluar dari prinsip-prinsip ekonomi. Masyarakat Indonesia lambat laun akan merasakan dampaknya. Tahun 1966, laju Inflasi bahkan mencapai 650%⁷ dan utang luar negeri semakin menumpuk dengan beban bunga yang tinggi. Dalam Istilah asing sering kita dengar dengan kalimat, *The economy grows at night. Why at night? Because at night the government sleeps.*

Tanggal 10-20 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) menyelenggarakan Seminar Ekonomi yang kemudian hasilnya dibukukan dengan judul: *The Leader; the Man and the Gun*.⁸ Pembicara dalam forum tersebut adalah antara lain Prof. Ali Wardhana, Prof. Sadli, Prof. Subroto, Prof. Emil, dan Prof. Widjojo (Semuanya dari FE-UI). Bulan Mei 1966, Kesatuan Aksi Sardjana Indonesia (KASI) bersama Universitas Indonesia menyelenggarakan Simposium Kebangkitan Semangat '66,

yang sedang mengalami masalah, meliputi bidang ekspor-impor, harga, perusahaan dagang milik negara, gaji dan dana pensiunan PNS dan Tentara, dan lain-lain. Departemen Penerangan RI, *Peraturan-peraturan Negara tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi*. (Jakarta: Departemen Penerangan, 1963), hlm. 93.

⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶ Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Membangun Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 48-49.

⁷ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 2.

⁸ Kebijakan pemerintah yang semena-semena, seperti menaikkan pajak, pungutan, harga resmi, dan lain-lain, dinilai sangat memberatkan dan menyeleweng dari prinsip-prinsip ekonomi yang seharusnya. Lihat Widjojo Nitisastro, (2010), *op. cit.*, hlm. 32-33.

dan Prof. Ali Wardhana ditunjuk sebagai ketua simposium. Simposium ini juga mengajak masyarakat untuk mengkritik atas kebijakan ekonomi pemerintah yang merugikan.⁹

Bulan Juli 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyelenggarakan sidang tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Sidang tersebut mengesahkan Ketetapan MPRS No. XXIII/1966 yang intinya berisi tentang koreksi total terhadap cara pandang penanggulangan ekonomi dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Ketetapan tersebut, tidak lepas dari sumbangsih pemikiran dari pakar ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI). Sumbangan pemikiran tersebut disusun oleh Prof. Ali Wardhana, Prof. Sadli, Prof. Subroto, Prof. Emil Salim, dan Prof. Widjojo Nitisastro.

Tahun 1968 Soeharto secara resmi dilantik menjadi presiden Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 untuk masa jabatan 1968-1973. Kabinet Ampera secara otomatis harus didemisioner dan digantikan dengan kabinet yang baru, yaitu Kabinet Pembangunan. Program pokok kabinet pembangunan tersusun dengan sebutan Panca Program atau Panca Krida Kabinet Pembangunan. Salah satunya adalah melaksanakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Repelita I, disusun juga tim ahli ekonomi. Tim ahli ekonomi bertugas untuk mengajukan pertimbangan kebijakan ekonomi kepada presiden. Jabatan ini, banyak yang berasal dari ahli ekonom Universitas Indonesia (UI). Begitu juga jabatan menteri dalam bidang ekonomi. Rektor UI Prof. Dr. Sumantri Brodjonegoro diangkat sebagai Menteri Pertambangan, Dr. Sumitro Djojhadikusumo diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Dekan Fakultas Ekonomi (FE-UI) Prof. Dr. Ali Wardhana menjadi Menteri Keuangan.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kalangan profesional dipercaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁰ Departemen Penerangan RI, *Menteri-Menteri Kabinet Pembangunan III*. (Jakarta: Departemen penerangan RI, 1978), hlm. 77.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti peran Ali Wardhana sebagai menteri keuangan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia tahun 1968-1973. Hal yang menarik yang mendasari penelitian ini adalah masih terbatasnya kajian penelitian tentang penulisan sejarah ekonomi di Indonesia. Fokus kajian penelitian ini adalah membahas tentang posisi perekonomian Indonesia di kancah International dan juga kebijakan keuangan Indonesia beserta dampaknya terhadap perkembangan perekonomian Indonesia tahun 1968-1973.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu (1) pemilihan topik, (2) Pengumpulan Sumber atau Heuristik, (3) Verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) Interpretasi : analisis dan sintesis, dan (5) Penulisan.

Penulis menggunakan tiga pendekatan dalam melakukan penelitian sejarah. Yaitu 1) Pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 1968-1973. Pendekatan ekonomi yang penulis gunakan mengacu pada aliran Sejarah Ekonomi Baru atau *New Economic History*. Yaitu penulisan sejarah dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, seperti teori ekonomi, kuantifikasi, statistik, matematika dan komputer dengan prosesing data yang diterapkan dengan ketat.¹¹ Penulis menggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisis kondisi perekonomian Indonesia yang menjadi dasar kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 1968-1973, berdasarkan data-data yang ada dilapangan.

2) Pendekatan politik. Pendekatan politik menyoroiti tentang struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya.¹² Pendekatan politik menganalisis segala aktivitas pemerintahan pada

¹¹ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 74.

¹² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*.

kekuasaan Orde Baru. Ali Wardhana sebagai salah satu jabatan yang duduk di posisi pemerintahan pasti berhubungan dengan politik. Jenis pendekatan politik yang penulis gunakan adalah pendekatan politik institusional. Yaitu Pendekatan politik yang perangkat operasionalnya berupa kabinet, birokrasi, militer, parpol, ormas, atau LSM.¹³

3) Pendekatan Antropologi. Pendekatan antropologi merupakan pendekatan untuk mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari tokoh sejarah, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup dan lain sebagainya.¹⁴ Pendekatan antropologi digunakan oleh penulis untuk mengetahui profil Ali Wardhana sebagai satu tokoh nasional.

IV. HASIL PEMBAHASAN

A. Profil Ali Wardhana

Ali Wardhana lahir pada tanggal 6 Mei 1928, di Solo. Selama hidup, Ali Wardhana telah melewati empat masa dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Saat kecil dia hidup pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Menginjak umur yang ke-17, Ali merasakan revolusi Indonesia yang mengantarkan pada era kemerdekaan. Pada masa Orde Lama, Ali belajar tentang ilmu ekonomi dan kemudian mengantarkan Ali sebagai salah satu ahli ekonomi yang berpengaruh pada masa Orde Baru Soeharto. Ali Wardhana juga merasakan era reformasi (pasca Orde Baru) dan wafat pada tahun 2015.

Ali Wardhana merupakan salah satu tokoh nasional yang berperan dalam perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya pada era Orde Baru. Ali Wardhana menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 15 tahun (1968-1983) dan Menko Ekonomi, Industri dan Pengawasan Pembangunan (1983-1988).

(Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 4.

¹³ Suhartono W. Pranoto (2006), *op.cit.*, hlm. 71.

¹⁴ Sartono Kartodirdjo (1993), *log. cit.*, hlm. 4.

Hal tersebut menjadikan Ali sebagai menteri keuangan terlama (*The Longest Finance Minister*) yang pernah ada dalam sejarah kabinet Indonesia.

Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan, Ali juga menjabat sebagai salah satu anggota *Broad Governor of World Bank and IMF* selama 15 tahun (1968-1983), dan ditahun 1971-1972, Ali terpilih menjadi *Chairman Governor of World Bank and IMF*. Bahkan disaat yang bersamaan, Ali Wardhana menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) selama 10 tahun (1968-1978).

Prestasi Ali Wardhana tidak lepas dari pendidikan yang telah ia tempuh. Ali Wardhana lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Saat menjadi mahasiswa FEUI, Ali Wardhana menjadi asisten Prof. Hans Schmidt, seorang dosen FEUI dengan fokus kajian keuangan dan moneter (*Finance and Monetary Field*). Ali juga aktif berorganisasi dan bergabung dalam Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Sebuah lembaga milik FEUI dengan fokus kajian tentang masalah-masalah ekonomi.

Setelah lulus dari FEUI tahun 1958, Ali Wardhana melanjutkan pendidikannya ke University of California at Berkeley, Amerika Serikat. Ali mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation, yaitu beasiswa dari pemerintah Amerika untuk negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 1961, Ali mendapatkan gelar M.A (*Master of Art*) dan kemudian mendapat gelar Ph.D (*Doctor of Philosophy in Economics*) tahun 1962. Judul disertasi bertema tentang kebijakan moneter yaitu "*Monetary Policy in an Underdeveloping Economy, with Special Reference to Indonesia*".¹⁵

Ali Wardhana adalah angkatan kedua yang berangkat melanjutkan studi *postgraduate* ke University of California at Berkeley. Angkatan pertamanya adalah kelompok Widjojo Nitisastro, Suhadi Mangkusuwondo, Barli Halim dan lain-lain. Ali Wardhana, setelah kembali ke Indonesia, menjadi dosen dan memperkuat Trio Dosen yaitu Widjojo-Sadli-Subroto yang berada di FEUI.

¹⁵ Departemen Penerangan RI (1978), *op.cit.*, hlm. 77.

Tahun 1966, Ali Wardhana bersama empat tokoh FEUI ditunjuk sebagai Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden RI.¹⁶ Mereka adalah Widjojo Nitisastro sebagai ketua, Moh. Sadli, Subroto, Emil Salim dan Ali Wardhana. Kelima tokoh tersebut sering disebut-sebut sebagai “*Berkeley Mafia*” dan arsitek ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru.¹⁷

Ali Wardhana memang bukan tipe seorang orator, tetapi dia adalah seorang konseptor dan sang pengambil keputusan (*a conceptor and policy maker*). Dibawah kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan, Ali Wardhana berhasil menekan inflasi dari 650% pada tahun 1966, hingga 10% pada tahun 1969. Ali Wardhana juga berperan dalam menentukan kebijakan anggaran berimbang (*balanced budget*) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). *These series of policies from Ali Wardhana brought Indonesia's development to the level of Asian Miracle.*¹⁸

Ali Wardhana juga berperan dalam mencari sistem moneter internasional yang pada tahun 1971 mengalami krisis. Ali Wardhana dipilih menjadi ketua dari 20 panitia (*Twenty Committee*) yang bertugas untuk

¹⁶ Salah satu cerita yang turun menurun atau gurauan dikalangan mahasiswa FEUI, yaitu ketika seseorang mempunyai posisi yang penting di FEUI, maka dengan mudah akan menempati posisi yang penting pula di pemerintahan Indonesia. Cerita tersebut diceritakan oleh Jakob Oetama dalam pengantar buku *A tribute to Ali Wardhana, There was a joke at the time that if one is given a responsibility in the Faculty of Economics, UI, it means that you are a candidate to become a Minister*. Walaupun hanya cerita belaka, namun hal tersebut selaras dengan realitas yang ada. Lihat Maria Pangestu, *A tribute to Ali Wardhana: Indonesia's Longest Serving Finance Minister: From His Writing and His Colleagues*, (Jakarta: Kompas, 2015), hlm. x

¹⁷ “*Berkeley Mafia*” adalah sebutan bagi lima orang Indonesia yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh. Sadli, Subroto dan Emil Salim, yang rata-rata kuliah di *University of California at Berkeley, USA*, kecuali Moh. Sadli dan Subroto. *Berkeley Mafia* terhimpun ketika Soeharto menunjuk mereka berlima menjadi Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional. *In those days, Professor Widjojo was the leader of an economic advisory committee set up by Soeharto. The committee consisted of young economists who are graduates of the University of California at Berkeley. Hence came the nickname “Berkeley Mafia”*. Lihat Moh. Arsjad Anwar dkk, *Tributes for Widjojo Nitisastro by Friends from 27 Foreign Countries*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 293-294.

¹⁸ Maria Pangestu (2015), *op. cit.*, hlm. 229.

mencari sistem moneter internasional yang baru. Sistem *Floating Exchange Rate* diterapkan secara global pada tahun 1973 dan sistem *Fixed Exchange-Rate* ditinggalkan.

B. Kebijakan Keuangan Menteri Ali Wardhana Tahun 1968-1973

1. APBN

Setiap tahun pemerintah, Presiden dibantu Menteri Keuangan, bertugas untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun yang akan datang. RAPBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan, dalam jangka waktu satu tahun.¹⁹

Tahun 1968, APBN masih mengalami penyesuaian administrasi. APBN 1969 Peralihan dibentuk untuk menyesuaikan APBN secara paten pada kurun waktu satu tahun dimulai 1 April hingga 31 Maret. APBN 1969 Peralihan disahkan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 1969 (Triwulan I). Kemudian, APBN secara rutin dimulai setiap tanggal 1 April hingga 31 Maret. APBN pada era Orde Baru dirancang sebagai jalan mensukseskan program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Usaha pembangunan era Orde Baru dapat dilihat pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah melalui menteri keuangan, menerapkan kebijakan “Anggaran Belanja yang Berimbang (*Balanced Budget*)”. Yaitu pengeluaran negara disesuaikan dengan penerimaan negara. Pengalaman perekonomian Indonesia selama Orde Lama, anggaran pengeluaran selalu lebih besar daripada penerimaan negara (defisit). Sehingga perekonomian nasional tidak berkembang dan menyebabkan inflasi yang tinggi. Pada masa itu pembangunan tidak terjadi, dan puncak keruntuhan ekonomi diikuti dengan keadaan sosial dan politik yang kacau pada saat itu. Simak Tabel berikut:

Pelaksanaan APBN dikatakan seimbang apabila jumlah total pendapatan negara sama dengan jumlah total pengeluaran negara. Apabila

¹⁹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, (Yogyakarta: BPEE, 2003), hlm. 45.

jumlah pendapatan negara lebih kecil dari jumlah pengeluaran negara, maka APBN dikatakan defisit (Pendapatan < Pengeluaran). Akan tetapi, jika jumlah pendapatan negara lebih besar dari pada pengeluaran negara, maka APBN dikatakan surplus (Pendapatan > Pengeluaran). Surplus penerimaan negara tersebut lebih dikenal dengan sebutan “Tabungan Pemerintah”. Tabungan pemerintah ini merupakan sumber pembiayaan bagi proyek-proyek pembangunan. Apabila jumlah total Tabungan Pemerintah tidak mampu membiayai proyek-proyek pembangunan, maka kekurangannya ditutup dengan hutang atau kredit luar negeri.

2. Perpajakan

Pajak secara garis besar tergolong menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayar oleh pihak tertentu, tetapi kemudian dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penjualan (PPn), Pajak Impor Ekspor, Pajak Bea Cukai, dan Bea Materai.

Sejarah perpajakan di Indonesia mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, sebelum perang dunia, pajak lebih dikenal dengan kewajiban kerja paksa (rodi) untuk membangun prasarana terutama jalan. Kemudian beberapa jenis peraturan pajak dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk ordinansi pajak, diantaranya ordonansi pajak pendapatan tahun 1920 atau *Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920* (kebijakan ini direvisi pada tahun 1932 dan kemudian direvisi lagi pada tahun 1944), ordonansi pajak persereon tahun 1925 (*Ordonantie op de Vennootschapbelasting*), ordonansi pajak kekayaan tahun 1932 (*Vermogen-belasting*) dan ordonansi pajak upah tahun 1935 (*Loonbelasting*), dan lain-lain. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pajak tidak dikenal tetapi rakyat diwajibkan untuk melakukan

pekerjaan dengan paksa (romusha) tanpa bayaran atau hanya diberikan makanan yang tidak memadai.²⁰

Sistem perpajakan di Indonesia, hingga tahun 1967, menggunakan *Official Assesment System*. Yaitu pemungutan besarnya pajak ditentukan oleh aparat perpajakan (fiskus pajak), bukan wajib pajak. Praktek *Official Assesment System*, wajib pajak pada awal tahun dikenakan ketentuan sementara untuk pajak-pajak pendapatan, pajak kekayaan, ataupun pajak perseoran berdasarkan atas pendapatan, kekayaan, dan laba menurut perkiraan taksiran pejabat pajak untuk tahun yang berjalan. Dan diakhir tahun, wajib pajak harus membayar dan memasukan surat pemberitahuan yang berisi tentang besarnya pendapatan atau kekayaan ataupun laba perseroan sebelum tahun yang baru datang. Kelemahan dari sistem ini adalah sulit untuk memperkiraan besaran jumlah pendapatan atau kekayaan, ataupun laba perseroan. Ada kalanya ketentuan sementara tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Pada awal Orde baru, Peraturan perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-undang no. 8 tahun 1967 tentang perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan (PPd), Pajak Kekayaan (PKk), dan Pajak Perseroan (PPs). Sistem pemungutan pajak diubah dari menggunakan *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* dan *With Holding System*.²¹

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak adalah wajib pajak itu sendiri dan bukan fiskus pajak. Sedangkan sistem *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak dimana yang menghitung besarnya pajak adalah pihak ketiga. Undang-undang no. 8 tahun 1967 lebih dikenal dengan UU MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang Lain). Simak kalimat berikut :

²⁰ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 1-5.

²¹ S. Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 41-42

From 1968 through 1983, income tax -corporate and individual- had to be paid in the course of the tax year through MPS and MPO. MPS means “calculating and paying one’s own tax”. Under the MPS system, the taxpayer had to compute his own income tax and deposit it with the Treasury. The Base of MPS was the gross sales or gross revenue over a certain month or some other taxable amount determined by the Director General of Taxation.²²

Awal Orde Baru, peraturan perpajakan masih menggunakan kebijakan Ordinansi Pajak peninggalan kolonial. Hanya saja sistem pembayaran pajak diubah menjadi sistem MPS dan MPO. *The monthly general rate of MPS was one percent. And MPO means “withholding of other taxpayer’s tax”. The general rate of MPO on each payment was 2 percent.²³* Pemikiran tentang adanya perubahan dalam sistem perpajakan, tidak lepas dari peran Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro. Anggotanya terdiri dari para teknokrat yaitu Ali Wardhana, Mohamad Sadli, Subroto dan Emil Salim.

Pada masa Repelita I, perpajakan di Indonesia mengalami deregulasi secara bertahap. Penyempurnaan dan perubahan aturan perpajakan dilakukan oleh menteri keuangan, khususnya dalam hal tarif pajak. Seperti penetapan tarif Pajak Pendapatan.²⁴ Penetapan tarif Pajak Perseroan berdasarkan Ordonansi Pajak 1925,²⁵ dan Perubahan dan keringanan perpajakan (Pajak Penjualan, Pajak Perseroan, dan Bea Ekspor-Impor) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.²⁶

²² R. Mansury, *The Indonesian Income Tax: A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*, (Singapore: Asian-Pacific Tax and Investment Research Centre, 1992), hlm. 20.

²³ *Ibid.*, hlm. 20

²⁴ Perubahan tarif pajak pendapatan tahun 1970 adalah potongan pajaknya sebesar 10% hingga 50% dari total pendapatan, yang sebelumnya berkisar dari 15% hingga 50%. Perubahan ini menjadi penurunan pajak bagi ke orang yang berpenghasilan rendah, dan meningkatkan pajak bagi orang yang berpenghasilan tinggi.

²⁵ Tarif Laba dari Ordinansi Pajak Peseroan adalah 10% dari total laba sebesar Rp 10.000.000 dan 20% untuk laba diatas Rp 10.000.000.

²⁶ Keringanan perpajakan ini bertujuan untuk mensukseskan progam penanaman

Pajak adalah sumber penerimaan pemerintah yang penting. Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan dalam bidang pajak meningkat setiap tahun. Angka pendapatan pajak di Indonesia tahun 1968 masih rendah, jika dilihat dari pendapatan pajak di negara-negara Asia Tenggara, dan masih mengandalkan dalam pendapatan dalam bidang minyak. Namun pendapatan negara dalam bidang perpajakan perlahan mendekati dan menyusul pendapatan pajak negara tetangga.

3. Reformasi Birokrasi

Kementerian keuangan dibawah kepemimpinan Ali Wardhana melakukan reformasi birokrasi. Ali Wardhana menyusun kembali klasifikasi jabatan dan tunjangan yang diberikan dalam departemen keuangan. Ali Wardhana juga paham untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktek korupsi, harus dimulai dari gaji atau tunjangan yang diberikan kepada para karyawan.

Pak Ali Wardhana understood the importance of building a strong institutions. Improvement in institutions started from better remuneration of staff (Ministry of Finance was the only institutions with high incentive compared to any other department). The reason was to erase any reason for corruption purposes due to small remuneration.²⁷

Ali Wardhana menaikkan gaji dalam bentuk “tunjangan khusus” sebesar 9 kali lipat dari biasanya yang hanya berlaku lingkungan kementerian keuangan. Hal tersebut ditambah dengan ditambahnya jam kerja dan sanksi yang lebih keras bagi para pegawainya. Pegawai di lingkungan kementerian keuangan juga dilarang untuk mengurus atau mempunyai usaha swasta. Usaha menaikkan gaji karyawan adalah untuk memposisikan departemen keuangan yang bersih dari praktek korupsi dan kinerja yang baik dalam

modal dalam negeri dan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembebasan Pajak (*Tax-Holiday*) diprioritaskan bagi industri-industri yang berpotensi untuk meningkatkan perkonomian nasional. Seperti usaha-usaha sarana-sarana pertanian/perkebunan, usaha yang menghasilkan 9 bahan pokok, industri alat-alat kesatan, usaha pengangkutan, industri kimia, dan usaha-usaha lan yang dipandang perlu diprioritaskan.

²⁷ Maria Pangestu (2015), *op., cit*, hlm. 254.

melayani masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan upaya Ali Wardhana dalam meningkatkan pendapatan negara sebagai menteri keuangan.

Gaji pegawai dalam Pengeluaran rutin APBN adalah maksimal sebesar 42,5 persen.²⁸ Biaya untuk menaikkan gaji memang menjadi resiko besar, tetapi jika tidak dijalankan akan lebih beresiko ketika para pegawai bermain curang. Kementerian keuangan sebagai “Bendahara Negara” mempunyai peran penting dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan negara dalam pembangunan. Pajak sebagai salah satu instrumen penting dari pendapatan negara harus dijalankan oleh pegawai-pegawai terampil dan dapat melayani masyarakat dengan baik.

Pemakaian tanda pangkat dan jabatan di lingkungan kementerian keuangan juga disempurnakan kembali untuk menunjukkan pangkat dan jabatan seseorang. Tanda pangkat, jabatan, pemakaian warga segaram, diatur berdasarkan jenjang pangkat dari golongan I hingga IV.

Reformasi birokrasi di lingkungan kementerian keuangan dapat dilihat dari kebijakan untuk menata kembali setiap direktorat jenderal. Terdapat lima direktorat jenderal yaitu Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea-Cukai, Direktorat Jenderal Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, dan ditambah dengan Sekretariat Jenderal sebagai Pusat Departemen keuangan.

Tata cara kerja setiap direktorat jenderal diatur berdasarkan keputusan-keputusan menteri keuangan. Tata cara dan kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai disempurnakan berdasarkan keputusan menteri keuangan tahun 1970, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1971, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara tahun 1972 dan seterusnya. *Building a strong and clean institution is not easy job and almost impossible to achieve in such a short period of time, but what is required is more how to have a sustainable process, Pak Ali Wardhana to do so . . .*²⁹

²⁸ *TEMPO Majalah Mingguan*, 3 April 1971, “Bila Penghasilan Pegawai Naik”, hlm. 46.

²⁹ Maria Pangestu (2015), *op. cit*, hlm. 255.

4. Keuangan di Irian Jaya

Wilayah Indonesia timur khususnya Irian Jaya menjadi bagian penting dalam proses pembangunan pada permulaan Orde Baru. Tahun 1969 Irian Jaya, yang sebelumnya bernama Irian Barat, secara resmi mejadi bagian dari wilayah Republik Indonesia melalui proses panjang dalam perebutan wilayah kekuasaan dengan negeri Belanda. Berdasarkan keputusan Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat), Irian Barat memilih untuk ikut bergabung dengan Republik Indonesia.

Daerah Irian Jaya, pasca kembali dengan Indonesia, dijadikan sebagai daerah otonom. Hal ini didasarkan pada sejarah pembangunan di Irian yang tergolong khusus. Pemerintah Indonesia tahun 1963, paska penyerahan pemerintahan Irian Barat dari PBB ke Indonesia, mengeluarkan mata uang Rupiah Irian Barat (IBRp). Hal tersebut untuk menggantikan mata uang Gulden Belanda yang ada di Irian Barat.

Awalnya mata uang IBRp yang beredar bernilai sama dengan nilai mata uang Gulden. Namun perekonomian Indonesia yang tidak menentu dan inflasi yang tinggi, malah membuat mata uang Rupiah melemah atas mata uang IBRp.

Pada akhir tahun 1965, mata uang Rupiah Indonesia diredenominasi dari Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00 yang baru, sehingga mata uang IBRp untuk pertama kalinya diturunkan nilai mata uangnya. Sejak tahun 1967-1970 mata uang Rupiah Indonesia mulai didevaluasi untuk memulihkan daya beli-jual perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden no. 8 tahun 1971, dan melalui menteri keuangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan mata uang Rupiah (Rp) sebagai alat pembayaran yang sah di Irian Jaya. Dengan begitu, secara otomatis mata uang Rupiah Irian Barat (IBRp) dihapuskan dan digantikan dengan mata uang nasional Indonesia (Rp). Kebijakan ini diterapkan karena mengingat perekonomian Indonesia sudah mulai stabil dan sanggup untuk melaksanakan pembangunan. Pemberlakuan mata uang Rupiah keseluruhan wilayah Indonesia menjadi urgent dilakukan.

Sebagai satu kesatuan negara, sudah semestinya mata uang yang berlaku tidak berbeda antar satu wilayah dengan wilayah yang lain.

C. Dampak Kebijakan Keuangan Menteri Ali Wardhana Tahun 1968-1973

Masalah ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia setelah jatuhnya Orde Lama adalah laju inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran, berkurangnya cadangan devisa, dan kesulitan dalam membayar hutang luar negeri. Orde Baru sebagai pemerintahan yang baru mengambil beberapa langkah untuk menciptakan stabilitas dan merehabilitasi perekonomian nasional.

Tugas Ali Wardhana sebagai menteri keuangan adalah mengurus tentang manajemen keuangan negara. Yaitu menyusun anggaran negara tersusun dalam APBN, pendapatan pemerintah dalam bidang pajak, tarif bea-cukai, dan kebijakan moneter yang lain. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara jelas dapat dilihat dari angka GDP (*Gross Domestic Product*). Setiap tahun angka pertumbuhan domestik meningkat diatas 6% (tahun 1968-1973).

Kebijakan budget seimbang (*Balanced Budget*) yang tersusun dalam APBN (Anggaan Pendapatan dan Belanja Negara) dapat menekan laju inflasi dan menambah cadangan devisa yang ada. Pada tahun 1968-1973, APBN selalu mengalami surplus. Hyperinflasi yang melanda Indonesia tahun 1966 sebesar 650% dapat diturunkan menjadi 10% pada tahun 1969. Namun, laju inflasi kembali meningkat pada tahun 1972-1973. Kenaikan harga inflasi disebabkan oleh kenaikan harga beras (gagal panen) dan sebagai akibat dari kenaikan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bulog ataupun bank-bank swasta yang lain.

Laju inflasi yang meningkat juga dapat dikatakan sebagai akibat dari realisasi APBN yang melenceng dari target. Tahun anggaran 1971/1972, realisasi APBN sebesar Rp 559,12 Milyar. Hal ini tidak mencapai target awal sebesar Rp 585,21 Milyar. Penurunan angka pendapatan pada APBN juga berimbas pada pemangkasan anggaran pengeluaran yang tersedia. Anggaran pengeluaran tahun 1971/1972 yaitu sebesar Rp 585,21 Milyar, namun kemudian dipangkas menjadi Rp 540,57 Milyar. Hal semacam inilah yang

menjadi sarang laju inflasi yang tinggi, walaupun pendapatan negara menjadi surplus. Seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam menganggarkan pengeluaran negara.

Kebijakan *Balanced Budget* pada APBN dapat meningkatkan tabungan pemerintah dan beberapa kali mengalami surplus. Namun angka surplus tersebut tercipta tidak lepas dari peran kredit luar negeri. Porsi pinjaman atau kredit luar negeri sangat berpengaruh pada keseimbangan APBN. Tahun 1969/1970, pinjaman luar negeri menempati porsi 77% dari pengeluaran pembangunan. Tahun 1970/1971 sebesar 71% dari pengeluaran pembangunan. Tahun 1971/1972 sebesar 69% dan 53% untuk tahun 1972/1973.³⁰ Walaupun masih tergantung pada pinjaman luar negeri, pemerintah masih berhati-hati dalam melakukannya. Indonesia dalam forum IGGI tidak menerima kredit luar negeri diatas bunga 3% pertahun. Hal tersebut karena melihat pengalaman sebelumnya akan kesulitan dalam membayar hutang-hutang luar negeri.

Pembaharuan kebijakan dalam bidang perpajakan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan negara dalam bidang pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Walaupun sudah ada peraturan pembebasan atau keringatan pajak telah dikeluarkan oleh menteri keuangan. Namun demikian, acuan peraturan perpajakan masih menggunakan aturan pajak peninggalan kolonial Belanda, yang tergolong kecil. Sistem tarif pajak MPS rata-rat hanya 1% dan MPO sebesar 2%. Beberapa barang tertentu yang dikenakan pajak sebesar 10-20%, seperti emas. Oleh karena itu, sejak Kabinet Pembangunan I, Ali Wardhana mempersiapkan untuk mereformasi sistem perpajakan di Indonesia.

Kebijakan reformasi birokrasi dalam lingkungan departemen keuangan berpengaruh pada tata kelola dan kinerja yang teratur. Jabatan-jabatan para staf dan karyawan diklasifikasikan kembali berdasarkan pangkat yang diperolehnya. Tata cara kerja disusun kembali disetiap direktorat

³⁰ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta:LP3ES, 1989), hlm. 224.

jenderal di lingkungan departemen keuangan. Reformasi birokrasi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai tugas negara dalam mengurus keuangan negara.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ali Wardhana merupakan salah satu tokoh nasional yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya pada era Orde Baru. Ali Wardhana sebagai pakar ekonomi moneter dari FEUI, diangkat menjadi menteri keuangan pada tahun 1968 (pada kabinet pembangunan I) hingga tahun 1983 (pada kabinet Pembangunan III). Kemudian menjabat sebagai Menko Ekonomi, Industri dan Pengawasan Pembangunan 1983-1988. Ali Wardhana dijuluki sebagai *the longest finance minister* karena dia menjabat sebagai menteri keuangan terlama sepanjang sejarah kabinet di Indonesia.

Ali Wardhana, ditengah-tengah kesibukannya sebagai menteri keuangan, dia juga merangkap jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) selama 10 tahun 1968-1978. Selain itu, Ali juga menjabat sebagai salah satu anggota *Broad Governor of World Bank and IMF* selama 15 tahun (1968-1983) dan ditahun 1971-1972, Ali terpilih menjadi *Chairman Governor of World Bank and IMF*.

2. Selama menjadi menteri keuangan dalam kabinet pembangunan I, Ali Wardhana mengeluarkan beberapa kebijakan. Yaitu kebijakan anggaran berimbang dalam APBN (*Balanced Budget*). Pengeluaran negara harus sesuai dengan pendapatan negara yang ada. Kebijakan tersebut akhirnya dapat meningkatkan tabungan pemerintah (Surplus) dan kemudian digunakan untuk proyek-proyek pembangunan. Akan tetapi, peningkatan pendapatan negara tersebut masih didominasi oleh kredit atau hutang-hutang luar negeri.

Selanjutnya adalah penyempurnaan peraturan perpajakan berdasarkan sistem pemungutan pajak yaitu sistem MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan sistem MPO (Menghitung Pajak Orang Lain). Seperti penetapan tarif Pajak

Pendapatan. Penetapan tarif Pajak Perseroan berdasarkan Ordonansi Pajak 1925, dan Perubahan dan keringanan perpajakan (Pajak Penjualan, Pajak Perseroan, dan Bea Ekspor-Import) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.

Ali Wardhana juga reformasi birokrasi di lingkungan departemen keuangan. Ali Wardhana menyempurnakan tata cara dan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menyusun kembali pos-pos Direktorat Bea Cukai di seluruh Indonesia. Serta menyempurnakan tugas-tugas di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Ali Wardhana sebagai menteri keuangan memberlakukan mata uang Rupiah (Rp) di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Irian Barat. Mata uang Irian Barat Rupiah (IBRp) diganti dengan mata uang Rupiah pada tahun 1971. Sejarah kembalinya Irian Barat pasca Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 memang menjadikan wilayah Irian Barat sebagai wilayah otonom Indonesia. Pemberlakuan mata uang nasional (Rp) adalah untuk menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai suatu negara yang utuh.

3. Pada akhir kabinet pembangunan I tahun 1973, perekonomian di Indonesia tumbuh diatas 6% (GDP). Hal ini tentu tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia melalui menteri keuangan. Kebijakan keseimbangan anggaran dalam APBN dapat meningkatkan tabungan pemerintah, walaupun masih ketergantungan pada kredit luar negeri. Begitu juga dalam laju Inflasi yang dapat dikendalikan.

Perturan perpajakan yang baru dapat meningkatkan pendapatan negara dari tahun ke tahun. Penyempurnaan tarif pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, peraturan pajak pada awal Orde Baru masih menggunakan peraturan pajak peninggalan kolonial yang tergolong kecil. Yaitu tarif MPS rata-rata adalah 1% dan MPO rata-rata sebesar 2%.

Ali Wardhana juga reformasi birokrasi di setiap direktorat jenderal di lingkungan departemen keuangan. Seperti tata kerja direktorat jenderal pajak, direktorat jenderal bea cukai, dan direktorat pengawasan keuangan negara. Hal tersebut berpengaruh dalam memberikan pelayanan sebagai salah satu tugas negara dalam mengurus keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Adam Malik. (1980). *In the Service of the Republic*. Jakarta: Gunung Agung.
- Azhari A. Samudra. (1995). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Badan Pusat Statistik. (1974). *Indikator Ekonomi Bulanan* No. 10/74. Jakarta: BPS
- Bank Indonesia. (1974). *Indonesian Financial Statistics* vol. VII No. 8. Jakarta: BI
- Bibit Suprpto. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara.
- Budi Setiyono dan Bonnie Triyana Ed. (2003). *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara*. Semarang: Mesiass.
- Clara Yoewono. (1974). *Indonesia dan Dunia Internasional 1974*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Departemen Penerangan RI. (1978). *Menteri-Menteri Kabinet Pembangunan III*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Depatemen Penerangan RI. (1969). *REPELITA: Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/1970-1973/1974*. Bandung: Doa Restu.
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Dumairy. (1999). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Faisal H. Basri. (2002). “*Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*” Jakarta: Erlangga.
- Hideyasu Iwasaki dkk (1971). *Asian Taxation 1970*, Japan: Japan Tax Association.
- Howard P. Jones. (1973). *Indonesia: The Possible Dream*. Singapore: Toppan.
- Legge, J.D (1972). *Sukarno A Political Biography*. New York: Praeger.
- Kemenkeu (2004), *Seri Perundang-undangan Perbankan Indonesia Tahun 1950-2004*. Jakarta: Kemenkeu.

- Kuntowijoyo. (2003), *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. Ashadhi dkk. (2006). *Sejarah Bank Indonesia Periode III: 1966-1983*, Jakarta: Bank Indonesia
- Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*. Yogyakarta: BPEE.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Maria Pangestu. (2015). *A tribute to Ali Wardhana: Indonesia's Longest Serving Finance Minister: From His Writing and His Colleagues*. Jakarta: Kompas.
- Moh. Arsjad Anwar dkk. (2007). *Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro*. Jakarta: Kompas.
- Moh. Arsjad Anwar dkk. (2007). *Tributes for Widjojo Nitisastro by Friends from 27 Foreign Contries*. Jakarta: Kompas.
- Mohtar Mas' oed. (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta:LP3ES.
- Roeder, O.G. (1970). *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- R. Mansury. (1992). *The Indonesian Income Tax: A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*. Singapore: Asian-Pacific Tax and Investment Research Centre.
- Radius Prawiro. (1998). *Bibliografi Radius Prawiro: Kiprah, Peran dan Pemikiran*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ross Garnaut dan Chris Manning "Irian Jaya: The Transformation of a Melanesian Economy", Penerjemah: M. Saleh Arief dan Peter Hagul (1979). *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia.
- S. Munawir. (1982). *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Sidi Gazalba. (1996). *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara.
- Soetrisno. (1981). *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: FE UGM.

Suhartono W. Pranoto. (2006). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suhartono W. Pranoto. (2006). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumarkoco Sudiro dan Faymond Toruan. (1982). *Mencari Bentuk Ekonomi Indonsia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981*. Jakarta: Gramedia.

Syafaruddin Usman dan Isnawita Din. (2010). *Pasang Surut Sejarah Papua dalam Pengakuan Ibu Pertiwi*. Tanpa Kota: Planet Buku.

T. Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.

T.H. Tambunan. (2011). *Perkonomian Indonesia: Kajian Teorits dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Thomas, Lloyd Brewster. (1997). *Money, Banking, and Financial Markets*. New York: Irwin/McGraw-Hill

Widjojo Nitisastro. (2015). *Pengalaman Membangun Indonesia*. (Jakarta: Kompas.

Majalah:

TEMPO Majalah Mingguan, 28 April 1973, “Memilih Ibu Kota Indonesia”, hlm. 8.

TEMPO Majalah Mingguan, 14 Agustus 1971, “Ali Wardhana Main Tjatur”, hlm. 8.

TEMPO Majalah Mingguan, 3 April 1971, “Bila Penghasilan Pegawai Naik”, hlm. 46.

TEMPO Majalah Mingguan, 3 Nopember 1973, “Siapa itu Dalang Inflasi?”, hlm. 44.

Skripsi:

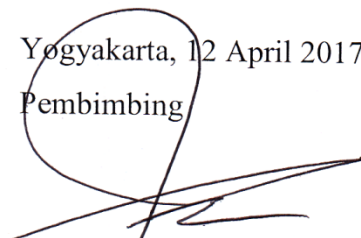
Dwi Agung Kurniawan, “Kebijakan Politik Dalam Negeri Kabinet Pembangunan I”, *Skripsi*, 2016, Yogyakarta: FIS UNY.

Devi Ciptyasari, “Kebijakan Ekonomi Presiden B.J. Habibie 1998-1999”, *skripsi*, 2015, Yogyakarta: UNY

Reviewer



Yogyakarta, 12 April 2017
Pembimbing



Reviewer

Dr. Aman, M.Pd
NIP. 19741015 200323 1 001

Yogyakarta, 12 April 2017

Pembimbing

Zulkarnain, M.Pd
NIP. 19740809 200812 1 001